

**PENGARUH KOMPETENSI DIGITAL APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI INDONESIA**

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Metode Penelitian Administrasi Publik



Disusun Oleh :

Nama : Alicia Zhafira Hanum

NPM : 2456041039

Kelas : Mandiri B

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN AJARAN
2025/2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan dalam cara administrasi publik beroperasi adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dielakkan di zaman sekarang. Sejak awal abad ke-20, administrasi publik telah berkembang berdasarkan pemikiran birokrasi klasik yang diintroduksi oleh *Max Weber*. Model birokrasi yang diajukan oleh *Weber* menekankan pada adanya hirarki yang tegas, prosedur formal, rasionalitas hukum, dan kepastian dalam peraturan. Pada zamannya, pendekatan ini sangat relevan karena memberikan stabilitas dan keteraturan bagi penyelenggaraan negara yang sedang membangun sistem pemerintahan modern. Namun, dengan perkembangan masyarakat, model birokrasi *Weber* dianggap mulai memiliki kekurangan serius, terutama terkait fleksibilitas dan kecepatan dalam menanggapi perubahan. Birokrasi yang terlalu kaku dan berpegang pada prosedur sering kali memberikan kesan lambat, tidak efisien, bahkan kurang mampu beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat yang semakin rumit.

Kritikan terhadap birokrasi Weberian mendorong lahirnya paradigma baru yang dikenal sebagai *New Public Management (NPM)* pada tahun 1980-an hingga 1990-an. NPM mengutamakan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan kinerja dalam administrasi publik dengan mengadopsi metode dari sektor swasta. Dengan pendekatan ini, pemerintah didorong untuk menawarkan layanan yang lebih cepat, fokus pada kepuasan masyarakat, sekaligus menerapkan mekanisme evaluasi kinerja yang lebih ketat. Namun, munculnya era digital membawa serta tantangan dan peluang baru yang tidak bisa sepenuhnya diatasi oleh NPM. Di sinilah paradigma *Digital Era Governance (DEG)* mulai diperkenalkan, yang menekankan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pemerintahan.

Digital Era Governance menganggap bahwa transformasi digital bukan sekadar penggunaan alat atau aplikasi baru, melainkan perubahan mendasar dalam cara berpikir birokrasi, struktur organisasi, serta cara pelayanan publik disampaikan. *Dunleavy dan rekan-rekannya (2006)* menunjukkan bahwa DEG menyoroti tiga aspek utama, yaitu digitalisasi proses administrasi, integrasi layanan publik antara berbagai instansi, dan pemanfaatan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Dengan adanya DEG,

pemerintah diharapkan dapat menyediakan layanan publik yang lebih terbuka, transparan, partisipatif, dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

Fenomena transformasi digital dalam birokrasi ini tidak hanya muncul di negara-negara maju, tetapi juga telah menjadi isu global. Hampir semua negara menjadikan digitalisasi birokrasi sebagai langkah prioritas dalam reformasi pemerintahan. Laporan *United Nations E-Government Survey* tahun 2022 mempertegas bahwa digitalisasi merupakan alat strategis untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, memperluas akses layanan, dan memperkuat akuntabilitas. Negara-negara seperti *Denmark, Korea Selatan, dan Estonia* sukses mencapai posisi teratas dalam pelaksanaan *e-government*. Estonia, misalnya, terkenal dengan program *e-Estonia* yang memungkinkan hampir seluruh layanan publik dilaksanakan secara daring, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga proses pemilihan umum. Keberhasilan *Estonia* menunjukkan bahwa digitalisasi dalam birokrasi dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.

Singapura juga sering dicontohkan. Melalui program *Smart Nation*, negara ini berhasil menciptakan ekosistem digital yang terintegrasi, di mana layanan publik dapat diakses dengan mudah, cepat, dan transparan. Bahkan, Singapura tidak hanya menggunakan teknologi untuk layanan publik, tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi dalam birokrasi memiliki dua dimensi, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan layanan publik sekaligus sebagai instrumen untuk mendemokratisasi pemerintahan.

Indonesia pun berusaha agar tidak tertinggal dalam perkembangan digitalisasi birokrasi global. Pemerintah Indonesia secara resmi menerapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018*. SPBE muncul sebagai kerangka utama untuk mewujudkan birokrasi yang berbasis digital. Tujuan dari SPBE yang tertuang dalam peraturan tersebut adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, bertanggung jawab, dan juga memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi. SPBE juga diakui sebagai elemen penting dalam *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*, di mana transformasi digital ditetapkan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan nasional.

Namun, meskipun peraturan telah ditetapkan dan berbagai kebijakan dikeluarkan, realita pelaksanaan SPBE di lapangan masih menghadapi banyak rintangan. Laporan Indeks SPBE Nasional 2022 yang dirilis oleh *Kementerian PANRB* mengindikasikan bahwa nilai rata-rata SPBE nasional hanya mencapai 2,34 dalam skala maksimal 5. Ini menunjukkan bahwa implementasi SPBE secara keseluruhan masih berada pada kategori “cukup”. Hanya sekitar 14,28 persen dari instansi pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah, yang berhasil meraih predikat “baik” hingga “sangat baik”. Sebagian besar instansi lainnya masih berada dalam kategori “cukup” bahkan “kurang”. Fakta ini menegaskan bahwa meskipun kebijakan telah jelas, pelaksanaan SPBE masih jauh dari harapan yang diinginkan.

Ketidakmerataan pelaksanaan SPBE juga terlihat antarwilayah. Beberapa provinsi di Pulau Jawa, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, berhasil mencatat skor SPBE di atas 3,4. Di sisi lain, banyak provinsi di bagian timur Indonesia, seperti Papua dan Maluku, hanya memperoleh skor di bawah 2,0. Data ini menunjukkan adanya disparitas yang cukup signifikan dalam pelaksanaan SPBE di seluruh Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam layanan publik antarwilayah, di mana warga di daerah dengan skor SPBE rendah akan menghadapi kesulitan lebih besar dalam mengakses layanan publik digital dibandingkan dengan warga di daerah dengan skor SPBE tinggi.

Perbedaan dalam pelaksanaan SPBE dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, keterbatasan *infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)* di berbagai daerah. Data dari *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2023)* menunjukkan bahwa walaupun tingkat penetrasi internet nasional mencapai 79,5 persen atau sekitar 220 juta pengguna, distribusinya tetap sangat tidak merata. Akses internet di Pulau Jawa mencapai lebih dari 88 persen, sedangkan di Papua dan Maluku hanya sekitar 50-55 persen. Ketidakmerataan infrastruktur ini berimplikasi pada lambatnya adopsi layanan digital di daerah yang tertinggal.

Faktor kedua adalah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Berdasarkan laporan *Kementerian Keuangan (2022)*, rata-rata alokasi anggaran untuk pengembangan teknologi informasi di tingkat daerah hanya berkisar antara 1,5-2 persen dari total APBD. Angka ini tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan yang sebenarnya

untuk membangun infrastruktur digital, membeli perangkat keras serta perangkat lunak, dan melatih pegawai negeri agar dapat mengoperasikan sistem digital dengan efektif. Akibatnya, banyak daerah hanya mampu mengembangkan aplikasi yang sederhana, yang tidak terintegrasi dan tidak berkelanjutan.

Faktor ketiga adalah adanya banyak aplikasi pemerintah yang terfragmentasi. Data dari *Kementerian PANRB (2022)* menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 24.000 aplikasi pemerintah yang dikembangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Ironisnya, sekitar 70 persen dari aplikasi tersebut tidak memiliki koneksi satu sama lain. Situasi ini menciptakan masalah serius, karena masyarakat kerap kali terpaksa mengisi data yang sama pada aplikasi yang berbeda untuk mengakses layanan yang seharusnya serupa. Fragmentasi ini tidak hanya menyulitkan masyarakat, tetapi juga menyebabkan pemborosan anggaran dan menurunkan efisiensi layanan publik.

Selain tiga faktor itu, budaya birokrasi yang kaku dan menolak perubahan juga menjadi hambatan yang signifikan. Sebagian besar pegawai negeri sipil di Indonesia masih terikat pada cara kerja manual yang mengandalkan dokumen fisik. Transisi menuju digital sering kali dilihat sebagai tambahan beban yang sulit, bukan sebagai kesempatan untuk meningkatkan efisiensi. Penelitian *Nugroho dan rekan-rekannya (2021)* menunjukkan bahwa penolakan ASN terhadap digitalisasi disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang keuntungan teknologi, kekhawatiran akan menurunnya kekuasaan akibat meningkatnya transparansi, serta keterbatasan dalam kemampuan beradaptasi dengan inovasi teknologi yang baru.

Namun, elemen yang paling penting dan sering diidentifikasi sebagai penghalang utama adalah rendahnya kemampuan digital ASN. Berdasarkan laporan dari *Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2022)*, hanya sekitar 38 persen ASN yang memiliki kemampuan digital di tingkat menengah hingga mahir. Sebagian besar ASN masih berada pada tahap dasar, terbatas pada penggunaan perangkat lunak perkantoran seperti Microsoft Office atau aplikasi komunikasi online. Survei dari *Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, 2023)* juga mengungkapkan bahwa sekitar 41 persen ASN mengalami kesulitan saat beradaptasi dengan aplikasi digital baru yang diterapkan dalam instansinya. Situasi ini menunjukkan bahwa kemampuan digital ASN belum memadai untuk mendukung pelaksanaan SPBE secara efektif.

Dasar dari kompetensi digital bagi *aparatur sipil negara (ASN)* sangat terkait dengan seberapa baik *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)* diimplementasikan. Di dalam manajemen publik, kualitas sumber daya manusia sering diidentifikasi sebagai penggerak utama perubahan dalam suatu organisasi. Tanpa adanya ASN yang handal, inovasi teknologi cenderung tidak berhasil karena tidak ada individu yang mampu melakukan operasi dan perawatan sistem dengan baik. Di berbagai belahan dunia, transformasi digital dalam birokrasi umumnya dimulai dengan program peningkatan kapasitas bagi ASN. Contohnya, Singapura mendirikan Smart Nation Academy yang memberikan pelatihan teknologi digital secara khusus untuk pegawai pemerintah di semua tingkatan. Program ini dirancang agar ASN di Singapura tidak hanya sekadar bisa menggunakan aplikasi digital dasar tetapi juga dapat memahami analisis data, kecerdasan buatan, serta aspek keamanan siber. Hal yang sama juga diterapkan oleh *Korea Selatan* yang menyediakan pelatihan terstruktur bagi pegawai negeri dalam pemanfaatan *big data*, *cloud computing*, dan teknologi terbaru lainnya.

Sementara itu, Indonesia masih berhadapan dengan tantangan berat mengenai kemampuan digital ASN. Survei dari *Kementerian PANRB* pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 62 persen ASN hanya memiliki kompetensi digital pada level dasar, seperti menggunakan aplikasi perkantoran atau media sosial. Hanya sebagian kecil ASN yang memiliki keterampilan menengah dan tinggi, seperti mengoperasikan aplikasi berbasis database, melakukan analisis data, atau memahami sistem keamanan siber. Sementara itu, dalam pelaksanaan SPBE, kemampuan teknis seperti manajemen database dan keamanan informasi sangat krusial. Rendahnya kompetensi ini menyebabkan banyak aplikasi SPBE hanya digunakan secara formalitas, tanpa benar-benar memperbaiki kualitas layanan publik.

Selain kemampuan digital, kepemimpinan dalam birokrasi juga berkontribusi pada keberhasilan SPBE. Banyak kepala daerah yang belum menjadikan transformasi digital sebagai prioritas dalam pembangunan. Akibatnya, anggaran untuk TIK seringkali sangat sedikit dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Data dari *Kementerian Keuangan* pada tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata anggaran TIK di tingkat pemerintah daerah hanya 1,5 hingga 2 persen dari APBD. Dengan anggaran yang sangat terbatas, pemerintah daerah kesulitan untuk membangun infrastruktur digital yang memadai

sekaligus melatih sumber daya manusia. Situasi ini semakin memperbesar jurang antara daerah maju dan daerah yang tertinggal dalam pelaksanaan SPBE.

Melihat data dari *United Nations E-Government Development Index (EGDI)* tahun 2022, Indonesia menempati urutan ke-77 dari 193 negara dengan skor 0,6610. Walaupun peringkat ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut masih jauh di bawah negara-negara tetangga. Singapura berada di posisi ke-12 dengan skor 0,9150, Malaysia di peringkat 48 dengan skor 0,7580, dan Thailand di posisi 55 dengan skor 0,7210. Kesenjangan ini menggambarkan bahwa Indonesia masih memiliki banyak hal yang perlu diselesaikan untuk mempercepat transformasi digital dalam birokrasi. Salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia tertinggal dibanding negara-negara tetangga adalah tidak adanya program nasional yang konsisten dan menyeluruh untuk meningkatkan kompetensi digital ASN.

Perbandingan antarnegara ini sangat penting karena menunjukkan bahwa digitalisasi dalam birokrasi tidak hanya terkait dengan infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas manusia. Negara seperti *Estonia, Singapura, dan Korea Selatan* berhasil karena mereka tidak hanya fokus pada pembangunan sistem aplikasi tetapi juga mempersiapkan aparatur yang mampu beroperasi secara efektif. Sebaliknya, di Indonesia, banyak aplikasi pemerintah terjebak pada tahap pengembangan tanpa diikuti dengan pelatihan yang memadai bagi aparatur. Akibatnya, aplikasi tersebut tidak dapat berfungsi secara optimal, bahkan kadang-kadang ditinggalkan begitu saja setelah beberapa tahun.

Selain keterampilan ASN, cara kerja birokrasi juga berkontribusi pada pelaksanaan SPBE. Di Indonesia, birokrasi masih dipengaruhi oleh budaya hierarki dan prosedural yang sangat mengutamakan kepatuhan pada regulasi formal. Budaya tersebut seringkali menghalangi munculnya inovasi, termasuk dalam bidang digital. Aparatur seringkali merasa tidak nyaman untuk berimprovisasi karena takut melanggar aturan, meskipun improvisasi tersebut sebenarnya dapat meningkatkan efisiensi dalam layanan. Ini menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan inovasi dan budaya birokrasi yang kaku.

Lebih jauh lagi, proses transformasi digital dalam birokrasi juga dipengaruhi oleh aspek politik. Digitalisasi birokrasi memerlukan keterbukaan dalam hal data dan transparansi anggaran. Hal ini seringkali dianggap mengurangi kebebasan bagi elite politik yang terbiasa dengan birokrasi yang tertutup. Akibatnya, penerapan SPBE

seringkali mengalami berbagai rintangan politik, terutama di daerah yang masih terpengaruh oleh kepentingan kelompok tertentu. Dalam hal ini, keterampilan digital ASN juga memiliki aspek politik, karena ASN yang memiliki kemampuan digital yang baik dapat mendukung keterbukaan data yang berdampak pada berkurangnya kemungkinan praktik birokrasi yang tidak transparan.

Apabila kita meneliti contoh-contoh di dalam negeri, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bagaimana keterampilan digital ASN berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan transformasi birokrasi. Kota Surabaya, misalnya, berhasil menciptakan *Surabaya Command Center* yang mengintegrasikan berbagai aplikasi untuk pelayanan publik. Keberhasilan ini bukan hanya disebabkan oleh dukungan infrastruktur, tetapi juga karena peningkatan kemampuan ASN di Kabupaten Surabaya. Aparatur diberikan pelatihan untuk mengoperasikan sistem digital, memahami pentingnya data, serta berinteraksi dengan masyarakat secara online. Sebagai hasilnya, Surabaya menjadi salah satu kota dengan layanan publik digital terbaik di Indonesia.

Sementara itu, Bandung juga mengembangkan ide serupa melalui *Bandung Command Center*. Pemerintah Kota Bandung meluncurkan berbagai aplikasi digital untuk pelayanan publik, termasuk sistem *e-budgeting* yang memungkinkan warga untuk mengakses informasi anggaran secara terbuka. Namun, pencapaian Bandung masih belum seoptimal Surabaya, karena masih menghadapi masalah dalam integrasi antarinstansi. Banyak aplikasi yang berjalan secara mandiri tanpa adanya keterhubungan data. Ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur telah tersedia, tanpa adanya kompetensi ASN yang mampu mengintegrasikan sistem, hasil yang diperoleh tidak akan maksimal.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bahkan dirancang sejak awal dengan penerapan konsep birokrasi digital. Pemerintah berencana agar seluruh proses birokrasi di IKN berbasis digital, dari layanan publik hingga manajemen internal. Konsep ini tentunya memerlukan ASN yang memiliki keterampilan digital yang tinggi. Jika ASN yang ditempatkan di IKN masih memiliki kendala dalam literasi digital, maka konsep birokrasi digital di IKN hanya akan menjadi jargon belaka tanpa adanya realisasi. Oleh karena itu, pembangunan IKN juga harus didukung dengan program peningkatan kapasitas digital ASN yang bersifat mendasar dan berkelanjutan.

Kondisi di Indonesia yang masih menghadapi banyak tantangan dalam pelaksanaan SPBE menunjukkan perlunya penelitian mengenai dampak keterampilan digital ASN terhadap efektivitas SPBE. Penelitian ini krusial karena dapat memberikan pemahaman empiris mengenai seberapa besar keterampilan digital ASN memengaruhi kualitas implementasi SPBE. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini dapat secara statistik menguji hubungan antara kompetensi digital ASN dan efektivitas birokrasi digital. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan untuk perumusan kebijakan dalam peningkatan kapasitas ASN yang lebih terarah.

Transformasi digital dalam birokrasi Indonesia melalui kebijakan *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)* sebenarnya merupakan bagian dari proses panjang reformasi birokrasi nasional. Sejak adanya reformasi pada tahun 1998, diskursus mengenai reformasi birokrasi selalu menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, lebih dari dua puluh tahun, pelaksanaan reformasi birokrasi sering terhambat oleh perlawanan budaya birokrasi, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dan kurangnya konsistensi dalam kebijakan. SPBE sebenarnya merupakan momentum penting karena menuntut perubahan yang lebih mendalam: tidak hanya menyederhanakan prosedur, tetapi juga melakukan digitalisasi total dalam proses administrasi pemerintahan.

SPBE menyatukan berbagai elemen dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari administrasi internal, pengelolaan data, hingga layanan publik. Karena itu, keberhasilan SPBE sangat tergantung pada kesiapan *Aparatur Sipil Negara (ASN)*. ASN merupakan garda terdepan dalam birokrasi; tanpa keberadaan mereka, kebijakan sebesar apa pun hanya akan jadi dokumen yang normatif. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah memastikan ASN dapat beradaptasi dengan perubahan digital yang terjadi dengan cepat.

Isu kompetensi digital ASN bukan hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga melibatkan dimensi struktural dan kultural. Dari segi struktural, masih banyak lembaga pemerintah yang belum memiliki standar kompetensi digital yang jelas untuk ASN. Proses rekrutmen, promosi, dan rotasi jabatan sering kali belum memperhitungkan kemampuan digital sebagai salah satu indikator penting. Padahal, di era digital ini,

menguasai teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan dasar seperti kemampuan berkomunikasi atau manajerial.

Dari sisi kultural, birokrasi di Indonesia masih terkesan dengan pola kerja yang manual dan berorientasi pada prosedur. Banyak ASN merasa lebih nyaman dengan dokumen fisik dibandingkan dengan dokumen digital. Selain itu, sebagian besar dari mereka masih memandang teknologi sebagai beban tambahan, bukan alat untuk mempermudah pekerjaan. Hal ini berpengaruh pada rendahnya semangat ASN untuk meningkatkan keterampilan digital mereka. Tanpa motivasi internal, pelatihan digital yang disediakan oleh pemerintah sering kali tidak memberikan hasil yang maksimal.

Dalam skala global, kompetensi digital ASN menjadi semakin krusial karena dunia tengah bergerak menuju pemerintahan digital yang sepenuhnya berbasis teknologi. Negara-negara yang berhasil dalam transformasi digital tidak hanya dapat meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi mereka. Estonia, sebagai contoh, berhasil menarik investasi asing berkat reputasinya sebagai negara dengan birokrasi digital yang efisien dan transparan. Singapura menjadi pusat keuangan global juga didukung oleh birokrasi yang responsif dan berbasis teknologi. Jika Indonesia ingin meningkatkan daya saingnya di tingkat internasional, maka peningkatan kompetensi digital ASN adalah langkah yang tidak dapat ditunda.

Lebih dari itu, rendahnya kompetensi digital ASN berdampak langsung pada kualitas layanan publik. Masyarakat Indonesia semakin terbiasa dengan layanan digital yang cepat dan mudah dari sektor swasta, seperti perbankan digital, layanan transportasi daring, dan *e-commerce*. Harapan masyarakat terhadap layanan publik pun meningkat. Mereka ingin mendapatkan layanan pemerintah yang sama mudahnya dengan layanan yang diberikan oleh sektor swasta. Namun pada kenyataannya, banyak layanan publik digital di Indonesia masih lamban, kurang ramah pengguna, dan sering mengalami gangguan teknis. Hal ini menyebabkan kekecewaan di kalangan masyarakat dan menurunkan tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintah.

Latar belakang ini juga menandakan bahwa isu kapasitas digital ASN bukanlah hal yang sepele. Ini adalah elemen dasar yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses digitalisasi birokrasi di Indonesia. Tanpa keberadaan ASN yang mumpuni, SPBE akan menjadi sekadar istilah politik yang tidak berarti. Namun, dengan ASN yang

profesional, SPBE bisa menjadi sarana konkret untuk menciptakan birokrasi yang bersih, terbuka, efisien, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan tuntutan bangsa saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kemampuan digital ASN dalam mendukung pelaksanaan SPBE di Indonesia?
2. Seberapa efektif pelaksanaan SPBE dalam meningkatkan mutu layanan publik?
3. Apakah ada dampak yang berarti antara kemampuan digital ASN dan efektivitas pelaksanaan SPBE?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendalami dan mengevaluasi kemampuan digital ASN dalam membantu pelaksanaan SPBE di Indonesia.
2. Menilai seberapa baik pelaksanaan SPBE dalam memperbaiki mutu layanan publik.
3. Melakukan uji kuantitatif untuk mengkaji hubungan antara kemampuan digital ASN dan efektivitas penerapan SPBE sehingga diperoleh pemahaman empiris yang jelas tentang dampak kemampuan digital ASN terhadap keberhasilan SPBE.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan berarti dalam pengembangan studi administrasi publik, terutama berkaitan dengan birokrasi digital serta peranan sumber daya manusia dalam mendukung perubahan teknologi pemerintahan. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat teori *Digital Era Governance (DEG)* yang menekankan pada pentingnya kolaborasi antara teknologi, proses birokrasi, dan kemampuan aparatur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, studi ini bisa menjadi acuan bagi lembaga pemerintah, baik yang berada di pusat maupun daerah, dalam menetapkan kebijakan peningkatan kapasitas bagi ASN. Hasil penelitian ini bisa dijadikan landasan untuk merancang program pelatihan digital, sertifikasi kompetensi, serta sistem rekrutmen ASN yang berbasis pada kemampuan teknologi informasi. Dengan begitu, temuan dari penelitian ini dapat mendukung pemerintah dalam meningkatkan efisiensi SPBE dengan cara yang nyata.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Di bidang kebijakan publik, penelitian ini dapat menawarkan masukan yang berbasis data kepada Kementerian PANRB, BKN, serta lembaga terkait lainnya dalam perumusan regulasi mengenai kompetensi digital ASN. Penelitian ini juga dapat memperkuat orientasi kebijakan reformasi birokrasi digital yang menjadi fokus nasional serta mendukung suksesnya pembangunan *Ibu Kota Nusantara (IKN)* yang direncanakan sebagai birokrasi berbasis digital.

1.4.4 Manfaat Sosial

Studi ini memiliki dampak sosial yang signifikan karena pada akhirnya tujuan utama SPBE adalah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Dengan meningkatnya kemampuan digital ASN, masyarakat akan menikmati layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus menguatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). *Laporan Survei Internet Indonesia 2023*. Jakarta: APJII.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). *Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and E-Government*. Oxford University Press.
- Kementerian PANRB. (2022). *Laporan Indeks SPBE Nasional 2022*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (2023). *Survei Literasi Digital Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Kominfo.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2022). *Laporan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Era Digital*. Jakarta: LAN.
- Meijer, A. J. (2020). Government transparency in the digital era: Concepts, conditions, and consequences. *Government Information Quarterly*, 37(3), 101486. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101486>
- Nugroho, Y., Sastrosubroto, A. S., & Setiawan, A. (2021). E-government and digital public services in Indonesia: Policy implementation and challenges. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(2), 125–140.
- Pratama, A. B. (2022). Literasi digital aparatur dan adopsi e-government di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 14–29.
- Setyowati, D., & Hidayat, A. (2021). Kompetensi aparatur sipil negara dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 9(2), 141–156.
- Supriyanto, E., & Wahyudi, A. (2022). Digitalisasi birokrasi dan tantangan sumber daya manusia aparatur. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 9(1), 33–47.
- United Nations. (2022). *UN E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government*. New York: United Nations.
- Van Deursen, A. J. A. M., & Van Dijk, J. A. G. M. (2019). The first-level digital divide shifts from inequalities in physical access to inequalities in material access. *New Media & Society*, 21(2), 354–375.

West, D. M. (2021). *Digital Government: Technology and Public Sector Performance*. Princeton University Press.

Yuliani, D., & Pramono, H. (2023). Kompetensi digital ASN dalam mendukung transformasi birokrasi menuju pemerintahan digital. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(1), 22–38.